

KEMISKINAN, KETIMPANGAN, DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

¹Ridwanul Hayat, ²Fathoni, ³Lulussiatullah
^{1,2,3} Universitas Nurul Jadid

[¹RidwanulHayat389@gmail.com](mailto:RidwanulHayat389@gmail.com), [²Gmail.tonifhatoni156@gmail.com](mailto:Gmail.tonifhatoni156@gmail.com)
[³lulussiatullah01@gmail.com](mailto:lulussiatullah01@gmail.com)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kemiskinan, ketimpangan, dan tantangan pembangunan ekonomi di Indonesia secara kualitatif. Pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak selalu mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan, sehingga sebagian masyarakat masih hidup dalam kondisi miskin dan rentan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui pengumpulan data dari wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Ketimpangan tersebut berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat miskin, termasuk keterbatasan mobilitas sosial, rendahnya kepercayaan terhadap institusi, dan meningkatnya kerentanan sosial. Penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan bagi pemerintah dan masyarakat, seperti keterbatasan kapasitas pembangunan, dominasi sektor informal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Ketimpangan, Pembangunan Ekonomi, Indonesia, Kualitatif

Abstract: This study aims to qualitatively analyze the phenomena of poverty, inequality, and the challenges of economic development in Indonesia. Stable economic growth does not always translate into equitable prosperity, leaving some people still living in poverty and vulnerability. This study employed a qualitative method with a descriptive approach, collecting data through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results indicate that poverty is multidimensional, influenced by limited access to education, health care, employment, and housing, as well as development disparities between

regions and social groups. This inequality impacts the social and economic lives of poor communities, including limited social mobility, low trust in institutions, and increased social vulnerability. This study also identified various challenges for the government and society, such as limited development capacity, the dominance of the informal sector, low quality human resources, and a lack of active community participation. Based on these findings, this study recommends the need for inclusive and equitable development policies, community empowerment, and collaboration between the government, society, and other stakeholders to create equitable and sustainable economic development.

Keywords: *Poverty, Inequality, Economic Development, Indonesia, Qualitative*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi persoalan struktural yang melekat dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan ekonomi yang signifikan selama beberapa dekade terakhir, dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan peningkatan pendapatan per kapita, manfaat pembangunan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat masih hidup dalam kondisi rentan, dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan yang layak, serta perlindungan sosial. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan kemampuan individu dan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan sosial dan ekonomi. (Aisyah, 2023)

Ketimpangan ekonomi di Indonesia terlihat dari perbedaan yang mencolok antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antara kawasan barat dan timur Indonesia, serta antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Pembangunan yang cenderung terpusat di wilayah tertentu, terutama di pusat-pusat ekonomi dan perkotaan besar, telah menciptakan kesenjangan dalam distribusi sumber daya dan peluang. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan spasial, yang tercermin dalam perbedaan kualitas infrastruktur, layanan publik, serta kesempatan kerja. Dalam jangka panjang, ketimpangan

yang terus berlanjut berpotensi memperlemah kohesi sosial dan menghambat upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Akib, 2025)

Tantangan pembangunan ekonomi di Indonesia semakin kompleks seiring dengan perubahan global dan dinamika internal. Globalisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan struktur ekonomi menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dan beradaptasi. Namun, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan menyebabkan sebagian masyarakat tertinggal dalam menghadapi perubahan tersebut. Selain itu, sektor informal yang masih mendominasi lapangan kerja membuat banyak pekerja berada dalam kondisi tidak aman dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas, mampu menyerap tenaga kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial. (Dimas, 2025)

Pembangunan ekonomi Indonesia dituntut untuk lebih berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial. Kebijakan pembangunan perlu dirancang secara inklusif dengan memperhatikan kebutuhan kelompok miskin dan rentan, memperkuat pembangunan daerah tertinggal, serta meningkatkan kualitas layanan dasar. Pendekatan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya diukur dari capaian makroekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena kemiskinan, ketimpangan, dan tantangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta pengalaman berbagai aktor yang terlibat dan terdampak oleh proses pembangunan, baik di tingkat individu, kelompok, maupun komunitas. Data penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta studi dokumentasi dari laporan pemerintah, kebijakan pembangunan, dan hasil penelitian sebelumnya. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi pengalaman dan pengetahuan mereka terhadap isu kemiskinan dan ketimpangan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dikategorikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antarfenomena yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, serta melakukan pengecekan ulang temuan melalui diskusi dan klarifikasi dengan informan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai dinamika kemiskinan dan ketimpangan, sekaligus memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap tantangan pembangunan ekonomi di Indonesia.

HASIL

1. Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Kondisi kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan fenomena yang saling berkaitan dan bersifat kompleks. Kemiskinan tidak hanya tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, perumahan yang layak, serta kesempatan kerja yang produktif. Dalam konteks pembangunan ekonomi, sebagian masyarakat belum mampu menikmati hasil pembangunan secara optimal karena adanya hambatan struktural yang telah berlangsung lama, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan modal, dan minimnya akses terhadap teknologi serta informasi. Akibatnya, kelompok masyarakat miskin cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, meskipun perekonomian nasional menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. (Majid, 2025)

Ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia terlihat jelas dari perbedaan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Wilayah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi umumnya mengalami perkembangan yang lebih pesat dibandingkan daerah perdesaan dan wilayah terpencil. Hal ini tercermin dari perbedaan kualitas infrastruktur, akses terhadap pasar, serta ketersediaan lapangan kerja. Selain itu, ketimpangan juga terjadi antara kawasan barat dan timur Indonesia, di mana wilayah barat cenderung lebih maju secara ekonomi dibandingkan wilayah timur. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya

merata dan masih terpusat pada wilayah tertentu, sehingga menciptakan kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. (Noer, 2025)

Ketimpangan pendapatan antarindividu dan antarkelompok juga menjadi persoalan yang signifikan. Sebagian kecil kelompok masyarakat dengan akses yang lebih besar terhadap pendidikan, modal, dan jaringan ekonomi mampu menikmati peningkatan kesejahteraan yang lebih cepat, sementara kelompok berpendapatan rendah mengalami peningkatan yang relatif lambat. Kondisi ini diperparah oleh dominasi sektor informal yang menyerap banyak tenaga kerja namun menawarkan pendapatan yang rendah dan perlindungan kerja yang minim. Ketidakpastian pendapatan dan keterbatasan jaminan sosial membuat kelompok miskin dan rentan lebih mudah terdampak oleh guncangan ekonomi, seperti krisis atau perlambatan pertumbuhan, sehingga memperlebar jurang ketimpangan. (Nurrohim, 2024)

Kesimpulannya, kondisi kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata belum cukup untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Pembangunan yang belum sepenuhnya inklusif menyebabkan sebagian masyarakat tertinggal dan tidak mampu berpartisipasi secara optimal dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi kemiskinan dan ketimpangan menjadi sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berorientasi pada pemerataan. Dengan mengatasi akar permasalahan struktural dan memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat di Indonesia secara berkelanjutan.

2. Dampak Ketimpangan Pembangunan terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Miskin

Ketimpangan pembangunan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat miskin, terutama dalam membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Ketika pembangunan lebih terpusat pada wilayah tertentu atau kelompok masyarakat tertentu, kelompok miskin sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik menyebabkan masyarakat miskin sulit meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kondisi ini membuat mereka tetap berada dalam situasi ekonomi yang

rentan dan bergantung pada pekerjaan berpendapatan rendah, sehingga memperkuat siklus kemiskinan yang berlangsung secara turun-temurun. (Putri, 2023)

Dari sisi ekonomi, ketimpangan pembangunan berdampak langsung pada peluang kerja dan tingkat pendapatan masyarakat miskin. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat umumnya berada di wilayah perkotaan, sementara masyarakat miskin di daerah perdesaan atau wilayah tertinggal memiliki pilihan kerja yang sangat terbatas. Banyak dari mereka yang akhirnya bekerja di sektor informal dengan tingkat upah yang rendah dan tanpa jaminan perlindungan sosial. Ketidakstabilan pendapatan ini membuat masyarakat miskin sulit memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan, apalagi untuk menabung atau berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, mobilitas sosial menjadi terhambat dan kesenjangan ekonomi semakin melebar. (Sarjito, 2023)

Ketimpangan pembangunan juga membawa dampak sosial yang mendalam bagi masyarakat miskin. Perasaan terpinggirkan dan ketidakadilan sosial dapat muncul ketika mereka melihat hasil pembangunan tidak dirasakan secara merata. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah, meningkatnya konflik sosial, serta melemahnya solidaritas antarwarga. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan sosial dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial dalam keluarga dan komunitas, termasuk meningkatnya risiko putus sekolah, pekerja anak, dan masalah kesehatan. Kondisi sosial yang rentan ini pada akhirnya dapat memperburuk keadaan ekonomi masyarakat miskin. (Aisyah, 2023)

Kesimpulannya, dampak ketimpangan pembangunan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat miskin menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak merata dapat memperdalam kemiskinan dan kerentanan sosial. Ketimpangan tidak hanya menciptakan perbedaan tingkat kesejahteraan, tetapi juga membatasi kemampuan masyarakat miskin untuk keluar dari kondisi tersebut. Oleh karena itu, upaya pembangunan perlu diarahkan pada pengurangan kesenjangan melalui kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kelompok miskin, seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta penciptaan lapangan kerja yang layak. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat miskin secara lebih adil dan berkelanjutan.

3. Tantangan Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Tantangan pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia bersifat multidimensional dan memerlukan upaya yang berkelanjutan. Pemerintah menghadapi tantangan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan kapasitas pembangunan antarwilayah, di mana daerah dengan sumber daya terbatas sering kali kesulitan mengoptimalkan program pembangunan yang telah dirancang secara nasional. Selain itu, keterbatasan data yang akurat dan terintegrasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin juga menjadi hambatan dalam penentuan sasaran kebijakan, sehingga program pengentasan kemiskinan tidak selalu tepat sasaran dan kurang efektif. (Akib, 2025)

Di sisi lain, tantangan juga muncul dari struktur ekonomi dan pasar tenaga kerja yang belum sepenuhnya mendukung pemerataan kesejahteraan. Dominasi sektor informal, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi membuat masyarakat miskin sulit meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Pemerintah dituntut untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Namun, proses ini sering kali dihadapkan pada keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta pengaruh dinamika ekonomi global yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan daerah. (Dimas, 2025)

Masyarakat juga menghadapi tantangan dalam berpartisipasi aktif dalam upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat kurang memahami peluang yang tersedia atau cara memanfaatkan program pemerintah secara optimal. Selain itu, faktor budaya dan sosial, seperti ketergantungan pada bantuan, rendahnya kepercayaan terhadap institusi, serta terbatasnya jaringan sosial dan ekonomi, dapat menghambat upaya pemberdayaan masyarakat. Di beberapa wilayah, keterbatasan akses informasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan juga membuat suara kelompok miskin kurang terwakili. (Hermawan, 2025)

Kesimpulannya, tantangan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia menuntut kolaborasi yang kuat antara pemerintah,

masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang inklusif, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan pemerataan pembangunan antarwilayah. Sementara itu, masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif melalui peningkatan kapasitas, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kelembagaan sosial di tingkat lokal. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga pembangunan ekonomi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

PEMBAHASAN

Fenomena kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia yang ditemukan dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya bersifat inklusif dan merata. Fenomena ini tercermin dari masih kuatnya pola pembangunan yang terpusat pada wilayah tertentu, terutama kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, sementara wilayah perdesaan dan daerah tertinggal mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur, layanan publik, dan peluang ekonomi. Kemiskinan yang dialami masyarakat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga multidimensional, mencakup keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak. Fenomena ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil belum secara otomatis mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, karena hasil pembangunan belum terdistribusi secara adil. Ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok sosial menjadi bukti bahwa pembangunan ekonomi masih menghadapi masalah struktural yang menghambat pemerataan kesejahteraan. (Noer, 2025)

Fenomena ketimpangan pembangunan juga berdampak nyata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat miskin. Ketidakmerataan pembangunan menciptakan kondisi di mana masyarakat miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan karena terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dominasi sektor informal dengan upah rendah dan minim perlindungan sosial menunjukkan bahwa banyak masyarakat miskin berada dalam kondisi kerja yang tidak aman dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Selain itu, dampak sosial seperti perasaan terpinggirkan, rendahnya kepercayaan terhadap institusi, serta melemahnya kohesi sosial mencerminkan bahwa ketimpangan pembangunan tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga pada relasi sosial dan stabilitas masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketimpangan yang berkelanjutan berpotensi

menimbulkan masalah sosial yang lebih luas jika tidak segera ditangani melalui kebijakan pembangunan yang lebih adil. (Nurrohim, 2024)

Dari sisi tantangan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi berbagai hambatan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pembangunan ekonomi. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas pembangunan di daerah, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta kurang optimalnya pemanfaatan data sosial ekonomi dalam perumusan kebijakan. Selain itu, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor informal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan besar dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Tantangan juga datang dari dinamika global, seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan teknologi, yang menuntut adaptasi kebijakan secara cepat dan tepat. Di sisi masyarakat, tantangan berupa rendahnya literasi ekonomi, keterbatasan akses informasi, serta faktor sosial budaya turut memengaruhi efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. (Putra, 2020)

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Kebijakan pembangunan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus secara simultan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin dan rentan. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan layak. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan implikasi teoretis bahwa kemiskinan dan ketimpangan perlu dipahami sebagai fenomena struktural yang memerlukan intervensi kebijakan jangka panjang dan terintegrasi. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin, sehingga pembangunan ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan di Indonesia.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi persoalan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemiskinan bersifat

multidimensional dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja yang layak, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Ketimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial, seperti meningkatnya kerentanan sosial dan melemahnya kohesi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemerataan agar mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan secara berkelanjutan.

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kemiskinan, ketimpangan, dan tantangan pembangunan ekonomi di Indonesia, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan ruang lingkup pembahasan yang bersifat umum, sehingga belum menggambarkan secara mendalam kondisi spesifik di setiap daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, keterbatasan data dan sumber informasi yang digunakan dapat memengaruhi kedalaman analisis terhadap dinamika kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta memperluas fokus pada wilayah atau kebijakan tertentu agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan spesifik terkait permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia.

1. SARAN

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, disarankan kepada Universitas Nurul Jadid, disarankan untuk terus memperkuat program pendidikan dan pengabdian masyarakat yang mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di sekitar kampus. Universitas dapat mengembangkan program pelatihan kewirausahaan, literasi ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu, Universitas diharapkan dapat mendorong terciptanya kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan dampak nyata dari program pembangunan, sehingga mahasiswa dan masyarakat sekitar sama-sama merasakan manfaatnya.

Selain itu, disarankan kepada mahasiswa meningkatkan peran aktif dalam memahami fenomena kemiskinan dan ketimpangan melalui keterlibatan langsung di masyarakat, penelitian lapangan, maupun kegiatan pengabdian masyarakat. Mahasiswa diharapkan tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan ekonomi, sosial, dan kebijakan publik untuk membantu masyarakat

miskin dan rentan. Selain itu, mahasiswa perlu mengembangkan keterampilan analisis, komunikasi, dan kolaborasi untuk dapat memberikan solusi kreatif dan inovatif terhadap masalah ketimpangan dan pembangunan ekonomi.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan dan metode penelitian agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang kemiskinan dan ketimpangan. Penelitian berikutnya dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, meneliti wilayah atau kelompok masyarakat tertentu, atau menyoroti sektor pembangunan tertentu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi kesejahteraan. Dengan cara ini, hasil penelitian akan lebih spesifik dan aplikatif sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan secara berkelanjutan.

1. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Universitas Nurul Jadid, khususnya dosen pembimbing dan seluruh staf akademik, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi selama proses penelitian. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga, teman, dan semua pihak yang telah membantu, memberikan masukan, dan mendukung secara moral maupun materiil sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif Dari Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(12), 3722-3736.
- Akib, F. H. Y., Novriansyah, M. A., & Wolok, E. (2025). DINAMIKA KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO: TREN, TANTANGAN, DAN STRATEGI PENANGGULANGAN 2012â€“2022. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(3), 1203-1215.

- Dimas, E. (2025). Tantangan dan Strategi Penanganan Kemiskinan Struktural dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial Inklusif. *Journal of Mandalika Social Science*, 3(1), 64-71.
- Hermawan, M. S., Judijanto, L., Kusumastuti, S. Y., Purnamaningrum, T. K., Suparyati, A., Pracoyo, A., ... & Ilma, A. F. N. (2025). *Pengantar Ekonomi Indonesia: Perkembangan dan Tantangan Perekonomian dalam Rangka Percepatan Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Abd Majid, M. S., Agustina, M., & Faisal, S. M. (2025). *Peran Perbankan dalam Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia*. USK Press.
- Noer, M. R., Damara, M. D., & Situmorang, R. M. (2025). PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIDAKADILAN: TINJAUAN PADA KETIMPANGAN SOSIAL DITENGAH KEMAJUAN EKONOMI DI INDONESIA MELALUI PRINSIP EKONOMI. *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 13(1), 184-193.
- Nurrohim, M. D., Aghil, M. S., Alazhari, M. A., Fahrezi, M. H., & Fadilla, A. (2024). Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1-7.
- Putra, R. F. I., & Lisna, V. (2020). Segitiga kemiskinan-pertumbuhan-ketimpangan (pgi triangle): pembangunan keuangan, pembangunan manusia, dan ketimpangan pendapatan di ASIA. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 28(2), 77-89.
- Putri, D. F., Sari, W. R., & Nabbila, F. L. (2023). Problematika Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 163-172.
- Sarjito, A. (2023). Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 6(2), 1-12.